

Sultan harus Kawal Persiapan Pilkada DIY

Tuesday, 23 September 2008 WIB, Oleh: Gusti

Yogya, KU

Mantan Rektor UGM Prof Dr Ichlasul Amal MA menyarankan Sri Sultan Hamengkubuwono X mesti mengawal persiapan proses pelaksanaan pilkada DIY seiring akan disahkannya RUUK DIY paling tidak dalam masa dua tahun mendatang. Maka dari itu, dirinya berharap Sultan masih mau menjabat sebagai Gubernur, minimal dalam dua tahun masa perpanjangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ichlasul Amal saat menanggapi pernyataan Sultan yang tidak ingin diperpanjang masa jabatannya hingga lima tahun, Selasa (23/9) di Kampus UGM. Menurut Amal, upaya pemerintah menunjukkan Sultan sebagai Gubernur DIY sangat tepat sekali karena apabila pemerintah menunjuk seseorang di luar Sultan sangat tidak bijaksana.

“Jika pejabat sementara di luar sultan, itu tidak wise bagi pemerintah, tentunya yang ditunjuk adalah sultan. Sekarang hanya menunggu SK dari presiden atau apa pun bentuknya,” kata Amal.

Bahkan Amal menyesalkan adanya Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY selalu dikaitkan keinginan Sultan untuk menjabat Gubernur seumur hidup sangat tidak relevan bahkan terkesan membatasi ruang gerak Sultan.

“Kasih Sultan, tidak bisa ikut nasional, dengan polemik draft RUUK ini sekarang ini orang ragu mencalonkan dirinya, kalo seperti ini kondisinya, karir Sultan sendiri seolah dibatasi,” jelasnya.

Mengenai penolakan Sultan yang enggan menjabat Gubernur dalam lima tahun lagi menurut hemat Amal sangat beralasan. Karena RUUK yang diajukan selama ini terkesan membatasi Sultan. Padahal Sultan merupakan tokoh nasional yang kontribusinya diperlukan oleh nasional. Saat ini saja kata Amal, Sultan sudah masuk nominasi sembilan tokoh calon pemimpin dari partai Golkar, sementara itu, Sultan juga masuk dalam daftar lima calon wapres dari partai PDIP.

Meskipun demikian, masuknya nama Sultan dalam daftar tersebut tidak memberikan kepastian akan masuk dan tidaknya Sultan menjadi pemimpin nasional apalagi situasi sekarang ini masing-masing partai menunggu hasil pemilu legislatif.

“Masuknya dalam daftar nominasi nama capres dan cawapres itu pun tidak juga memberikan kepastian menjadi di level nasional, karena semua partai selalu bilang pengumuman capres dan cawapres menunggu hasil pemilu legislatif, bahkan partai tertentu capresnya saja belum berani memperkenalkan diri, kecuali, Wiranto dan Prabowo,” imbuhnya.

Maka dari itu, Amal mengharapkan Sri Sultan untuk mengawal proses pelaksanaan Pilkada DIY Meskipun nantinya dalam RUUK Sultan tidak menjabat Gubernur, Amal memprediksikan posisi Sultan nantinya mirip dengan posisi Raja Monaco.

“Dari dulu saya pernah mengatakan posisi sultan idealnya seperti Raja Monaco. Raja Monaco itu, punya perdana menteri, namun ia dapat fasilitas dan sangat prestisius,” katanya. (HumasUGM/Gusti Grehenson)

Berita Terkait

- [Mendagri: UU Pemilu Selesai Tahun 2017](#)
- [Parpol Harus Mencari Elit, Bukan Elit Mencari Parpol](#)
- [Demografi Pemilih Memengaruhi Pilkada DKI](#)
- [Saatnya Rakyat Lebih Kritis Dalam Memilih Pemimpin](#)
- [PSP UGM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada](#)